

**PRINSIP *CHECK AND BALANCES* TERHADAP KEWENANGAN KEPALA
DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UU
NO. 21 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYĀH***

SKRIPSI

Oleh

Pariyetmi Putri

NIM. 05020421051



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

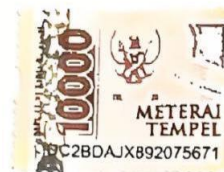
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pariyetmi Putri
NIM : 05020421051
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Prinsip Check and Balances terhadap Kewenangan
Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibukota
Nusantara Menurut UU No. 21 Tahun 2023
Perspektif Siyash Dusturiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 November 2024

Saya yang menyatakan,



Pariyetmi Putri

NIM. 05020421051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Pariyetmi Putri
NIM. : 05020421051
Judul : Prinsip Check and Balances terhadap Kewenangan
Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibukota Nusantara
Menurut UU No. 21 Tahun 2023 Perspektif Siyasa
Dusturiyah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 November 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik. S.H., M.H
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Pariyetmi Putri

NIM. : 05020421051

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV



Zainatul Ilmiah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 21 Desember 2024 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Nurfitri Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271990032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pariyetmi Putri
NIM : 05020421051
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara/ Hukum Publik Islam
E-mail address : pariyetmiputri5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRINSIP CHECK AND BALANCES TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DAN WAKIL
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UU NOMOR 21 TAHUN 2023
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2025

Penulis

(Pariyetmi Putri)

ABSTRAK

Ibu Kota Negara atau disingkat IKN merupakan wajah baru Ibu Kota Negara dengan klasifikasi pembangunan yang aman, modern dan berkelanjutan. Menindaklanjuti Pembangunan tersebut, pemerintah menerbitkan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau disingkat menjadi UU IKN. Pelaksanaan pemerintahan IKN dilaksanakan oleh Lembaga Otorita IKN Nusantara. Otorita IKN dijabat oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita. Kewenangan Badan Otorita IKN yang secara khusus berwenang untuk menetapkan bahwa norma, standar, prosedur serta kriteria yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 5 UU IKN. Kekhususan ini mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Kepala Otorita sehingga dikhawatirkan terjadinya sentralisasi kekuasaan serta hak rakyat dalam pengambilan keputusan terabaikan. Oleh karena itu, *check and balances* diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, skripsi ini hendak menjawab segala permasalahan dengan merumuskan dua pertanyaan sebagai berikut: bagaimana prinsip *check and balances* terhadap kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN; serta bagaimana prinsip *check and balances* terhadap kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN jika ditinjau dari *Siyāsah dusturiyāh*.

Penelitian ini termasuk kepada Penelitian Hukum Normatif melalui Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* dan Pendekatan Konseptual atau *conceptual approach*. Metode pengumpulan dan menganalisa bahan hukum secara deskriptif melalui metode interpretasi teleologis. Interpretasi ini dilakukan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan. Interpretasi ini beranjak dari pendekatan konseptual dikarenakan tidak ada aturan hukum dalam permasalahan kemudian penulis mengintervensikan UU IKN dalam prinsip *check and balances*.

Hasil dari penelitian ini, penulis simpulkan sebagai berikut: *pertama*, Otorita IKN merupakan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dimana Kepala dan Wakil Kepala Otorita bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga kedudukan Pemdasus IKN setingkat dengan pusat. Oleh karena itu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan *check and balances* ialah DPR; *Kedua*, dalam perspektif *Siyāsah dusturiyāh* DPR setara dengan *Wazīr Tafwidh* berwenang sebagai lembaga legislasi dalam membentuk regulasi yang bersifat nasional dan bertanggung jawab langsung kepada khalifah dan/atau imam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan untuk; *Pertama*, mengoptimalkan peran komisi II DPR sebagai mitra kerja yang sejalan dengan fungsi pengawasan, komisi ini diharapkan dapat berperan secara penuh sebagai *aspirator* sekaligus jembatan penghubung antara masyarakat dengan Kepala Otorita agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan guna mengontrol kebijakan yang diambil oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita. *Kedua*, diharapkan komisi II DPR dapat mengoptimalkan peran legislasi dan peran anggaran mengingat dana yang digunakan dalam pembangunan IKN diperoleh dari APBN.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi & Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah (<i>issue hukum</i>).....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TEORI KEWENANGAN, OTONOMI DAERAH, CHECK AND BALANCES DAN SIYĀSAH DUSTURIYĀH.....	25
A. Teori Kewenangan.....	25
1. Pengertian Kewenangan.....	25
2. Pemerolehan Kewenangan.....	27
B. Teori Otonomi Daerah.....	36
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	36

2.	Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah.....	38
3.	Asas-Asas Otonomi Daerah.....	39
C.	Teori Check and Balances.....	42
1.	Sejarah Check and Balances.....	42
2.	Pengertian Check and Balances.....	49
3.	Mekanisme Check and Balances.....	58
D.	Siyāsah Dusturiyāh.....	59
1.	Pengertian Siyāsah Dusturiyāh.....	59
2.	Ruang Lingkup Siyāsah dusturiyāh.....	60
BAB III KEWENANGAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IKN MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2023.....		78
A.	Kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.....	78
B.	Prinsip Check and Balances terhadap Kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Menurut UU No.21 Tahun 2023.....	88
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTURIYĀH</i> TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM KEWENANGAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2023.....		93
A.	Analisis Prinsip Check And Balances terhadap Kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menurut UU No. 21 Tahun 2023.....	93
B.	Analisis <i>Siyāsah dusturiyāh</i> terhadap Check And Balances Kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Menurut UU No. 21 Tahun 2023.....	102
BAB IV PENUTUP.....		108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....		111

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sait. "Desentralisasi: Konsep, Teori Dan Perdebatannya." *Jurnal Desentralisasi* 6, no. 4 (2005): 57–72. <https://doi.org/10.37378/jd.2005.4.57-72>.
- Ahmadi, and Hadin Muhjad. "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (June 2024): 1202–15. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6562>.
- Ahyar, Muzayyin. "Almawardi Dan Konsep Khiladah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 15, no. 1 (June 30, 2018): 1–26. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123>.
- Al Fikry, Ahmad Habib. "Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 8 (August 17, 2022): 609–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>.
- Al-Hamid, Syarif Anwar Said, Ade Firmansyah, and Siti Khoiriah. "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (December 30, 2023): 741–66. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1505>.
- Amal, Bakhrul, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (October 31, 2022): 346–54. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354>.
- Amina, Siti. "Konsep Negara Islam: Telaah Atas Pemikiran Al-Mawardi." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (March 20, 2021): 51–61. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.1.51-61>.
- Ariski, Riswandi. "Kewenangan Ahlul Halli Wal 'Aqdi Dan Ahlul Syaukah." UIN Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32383/1/Riswanda%20Ariski%2C%20160105056%2C%202023%2C%20HTN.pdf>.
- Astomo, Putra. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI TAHUN 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (April 26, 2018): 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>.
- Atmaja, Dewa Gede, and Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Aziz Fahri Nasution, Prawira Aziz Nasution, and Tomi Mandala Putra Nasution. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (June 20, 2022): 13–19. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.42>.
- Aziz, Mohammad Rifqi. "Peran Dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (December 25, 2023): 148–67.

- <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1308>.
- Baihaki, Reza, and Alif Fachrul Rachman. "Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 89–106. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.167>.
- Barhamudin, Barhamudin. "Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Solusi* 17, no. 2 (May 1, 2019): 175–92. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.171>.
- Begouvic, M. Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Lex Superior* 1, no. 1 (2022): 58–75.
- Bustamin, Bustamin, and Rony Jaya. "Urgensi Check and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no. 2 (2019): 221–32. <https://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>.
- Bustanul Ulum, STIAI. "Konsep Negara Islam: Telaah Atas Pemikiran al-Mawardi." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. No. 1 (March 1, 2021): 51–61.
- Caisar, Onelim P Alfian. "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nsantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perpsektif Siyāsah dusturiyāh" Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, 2022, Accessed Mei 29, .
- Dalimunthe, Dermina, and Arbanur Rasyid. "Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyasah." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2021. <http://etd.uinsyahada.ac.id/eprint/6551>.
- Endro Satoto and Zainal Arifin Hoesein. "Understanding The Ruling Of The Constitutional Court No: 90/PUU-XXI/2023 From A Civil Law And Common Law Perspective." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (December 11, 2023): 153–65. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2112>.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (July 15, 2019): 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.
- Fauziah, Hera. "Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah." *JOM Fakultas Hukum* III, no. No. 2 (Oktober 2016).
- Fitri, Resti Khairunnisa, and Dian Pertiwi. "Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Politik Islam* 2, no. 1 (July 5, 2023). <https://doi.org/10.31958/pi.v2i1.9371>.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung, 2009.
- Fudin, Hanif. "Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 202–24. <https://doi.org/10.31078/jk1919>.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (November 2020): 92–99. <https://doi.org/10.1555/kh.v2i3.8167>.
- Hakim, Lukman. "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan

- Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* I, no. No. 1 (June 2011): 103–30.
- Harbowo, Nikolaus, and Iqbal Basyari. “Pengawasan Pemerintahan IKN Nusantara Di Tangan DPR.” *Kompas.Id*, January 22, 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/21/pengawasan-kepala-otorita-ibu-kota-nusantara-problematik>.
- Hindiawati, Wahyu. “Problematik Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ke Kalimantan Timur Dalam Perspektif Hukum.” *Perspektif* 29, no. 1 (January 30, 2024): 36–45. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.897>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Syaibani Ihza. “Dinamika Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Al-Wizarah.” UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/15030/1/SKRIPSI%20SYAIBANI%20IHZA%20I%2C%20NIM%201717303076.pdf>.
- Jurdi, Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2019.
- Khairi, Mawardi. “Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum.” *SELISIK (Jurnal Hukum Dan Bisnis)* 3, no. No. 1 (June 2017): 79–102. <https://doi.org/10.35814/selisik.v3i1.658>.
- KOMISI II. “IKN Ditarget Rampung 2028, Komisi II Harap Prabowo Segera Terbitkan Keppres.” Jakarta: Sekretariat Jenderal DPRD, 2024.
- Maghrabi, Rizqi. “Tinjauan Fiqh Siyāsah dusturiyāh terhadap Pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut UU No.3 Tahun 2022”. Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2023. Accessed Mei 29, .
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marlina, Rika. “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 171–178 (March 10, 2018). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>.
- Muhakki, Muhakki. “Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah).” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (October 1, 2011): 135–58. <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158>.
- Mulyaningsih, Rizki. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 1, 2022): 296–309. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6>.
- Muthalib, Salman Abdul. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” *Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (Desember 2019): 150–66.
- Muthalib, Salman Abdul, and Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (April 29, 2022): 150–66. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>.
- Nadhir, Nabiyla, David Parlinggoman Sinaga, Muhammad Syawal, and Innayah

- Maghfirah Patola. "Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (February 8, 2024): 163–79. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8117>.
- Nur Aisyah, Siti, and Ni'matul Huda. "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Prosiding Nasional Hukum Aktual* 1, no. 4 (November 2023): 87–104.
- Nuridin, M. Rizki. "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 1, 2022): 617–33. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>.
- Nurrokhman, Arsan. "Otonomi Daerah: Teori, Esensi Dan Kritik Terhadap Praktik Di Lapangan," January 15, 2020. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5e83j>.
- Palupi, Aisyah Anudia, Diana Septaviana, and Rendy Airlangga. "Mekanisme Pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 3, no. 2 (Desember 2023): 147–61.
- Prayitno, Isnu Harjo. "Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PkM* 4, no. 1 (July 2023): 1153–63.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta A.L.W. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 280–93. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.
- Ramdan, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Citra Media Nusantara, 2021.
- Ridha, Muhammad Faizur. "Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)." UIN Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2859/1/Pustaka%20UIN.pdf>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Kritik Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Mewujudkan Checks and Balances." *Riau Law Journal* 7, no. 2 (November 20, 2023): 135–53. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8025>.
- Salamony, Jetter Wilson. "TINJAUAN PERUBAHAN NOMENKLATUR KEPALA DAERAH MENJADI KEPALA OTORITA PADA IBU KOTA NEGARA INDONESIA (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara)." *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2022).
- Samsu, La. "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al- Sul Ah Al- Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al- Qa A'Iyyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (June 2017): 155–71. <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.
- Saraswati, Retno. "Analisis Sitem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" 1, no. 1 (2021): 21–40. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143>.
- Sari, Lena Puspita, and Masril Masril. "Tinjauan Konstitusional Kedudukan Menteri

- Koordinator Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 6, no. 1 (January 31, 2021): 49–62. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2553>.
- Satria, I Gede Sandy. “Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Otonomi Khusus.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (January 2023).
- Sirait, Adi Syaputra. “Check and Balances Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal Uinsyahada* 2, no. 1 (2021): 47–53. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i1.3386>.
- Situngkir, Danel Aditia. “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. No. 4 (July 1, 2023): 8–14. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.
- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*. Cet. 1. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017.
- Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 201–10. <http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.
- Sunarto, Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (April 19, 2016): 157–63. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Syahfitri, Cut Novisar, Irfan Setiawan, and Nurul Khoiriah Putri. “Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Pendekatan Berbasis Teori Maupun Praktek.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13, no. 1 (49-59): 2021. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v13i1.2036>.
- Syakhbani, Boehaki, and Hery Suprayitno. “Cek and Balances Sistem Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Valid*, April 2013, 10, no. 2 (n.d.): 47–53.
- Umam, Khairul, Ashari Ashari, and Riska Ari Amalia. “Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila.” *JATISWARA* 38, no. 2 (July 31, 2023): 185–97. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>.
- “UU Nomor 21 Tahun 2023.Pdf,” n.d.
- Windrawan, Pugh. “Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitutional Heavy.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (May 20, 2016): 613–41. <https://doi.org/10.31078/jk942>.
- Yandy, Eza Tri, A Yuli Tauvani, Sulaeman Sulaeman, M. Yusuf, and Muhammad Isa. “The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (July 16, 2024): 165–83. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>.